

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Alive. (2020). Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Kepada Keluarga Penerima Manfaat Di Kelurahan Mahakeret Barat Dan Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 1–9.
- Anwaruddin, A. (2004). Pasang Surut Paradigma Administrasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 1(2), 1-16.
- Arikunto, S., & Jabar, S. A. (2010). Analisis Program Pendidikan Pedoman praktis Bagi Mahasiswa dan Praktis Pendidik. *Jakarta: Bimi Aksara*.
- Ariyanto, E. D., & Marom, A. (2021). Analisis Peran Stakeholder Dalam Program Pilah Sampah Di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(2), 221-239.
- Azizi, I., & Nurcahyanto, H. (2022). Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kabupaten Brebes. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(2), 164-181.
- Buana, A., & Setyono, J. S. (2022). Analisis Stakeholder dalam Penyusunan Rpjmg Gampong Dayah di Kabupaten Pidie. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2), 2550-2562.
- Bryson, J. M. (2004). What to do when stakeholders matter: stakeholder identification and analysis techniques. *Public management review*, 6(1), 21-53.
- Cholili, R. N., Wulandari, S., & Kasiami, S. (2024). Peran Stakeholders dalam Pencegahan Kekerasan Anak dan Pelecehan Seksual di Kabupaten Bojonegoro. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 2109-2119.
- Destiana, R., Kismartini, K., & Yuningsih, T. (2020). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(2), 132-153.
- Guhuhuku, Y., Ruru, J., & Tampongangoy, D. (2019). Community Participation In Development In Naga Village, Ibu Tenggara, West Halmahera District. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(77).

- Handayani, F., & Warsono, H. (2017). Analisis peran stakeholders dalam pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(3), 40-53.
- Henry, N. (2017). Paradigms of public administration. In *Public Administration and Public Affairs* (pp. 35-53). Routledge.
- Kharisma, B. (2014). Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 19(1), 1-34.
- Kusuma, S. D., Nurcahyanto, H., & Marom, A. (2022). Analisis Peran Stakeholders Dalam Upaya Pengembangan Desa Wisata Dengan Menggunakan Kerangka Pentahelix. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 11(4), 422-439.
- Kinasih, P. I., Purnaweni, H., & Maesaroh, M. (2023). Analisis Pemangku kepentingan Dalam Upaya Menciptakan Kota Layak Anak Di Kabupaten Demak. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3).
- Maharani, Asri Dhiah. (2010). Analisis Pengaruh Kepercayaan Pelanggan terhadap Loyalitas Nasabah Tabungan Bank Mega Semarang. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro
- Mahmud, M. Y. (2013). Membangun Governance Melalui Pendidikan Moralitas. *Al-Fikrah: Jurnal Kependidikan Islam IAIN Sulthan Thaha Saifuddin*, 4, 56425.
- Marzaniar, P., & Subarsono, A. (2023). Pemangku kepentingan salience analysis in the policy formulation of anti-violence against women and children. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 4(2), 149-174.
- Munthe, A. P. (2015). Pentingnya evaluasi program di institusi pendidikan: sebuah pengantar, pengertian, tujuan dan manfaat. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(2), 1-14.
- Nugroho, Hermawan Cahyo; Soesilo Zauhar; dan Suryadi. (2014) Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal J-PAL*, 5(1) : 12-22.
- Prayudi, M. A., Dewi, G. A. K. R. S., Vijaya, D. P., & Ekawati, L. P. (2018). Teori peran dan konsep expectation-gap fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 2(4), 449-467.
- Puspitasari, M., & Rodiyah, I. (2022). Keterlibatan Pemangku kepentingan dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sidoarjo. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 169-179.

- Rahmawati, A. A., Herawati, A. R., & Afrizal, T. (2023). Analisis Peran Pemangku kepentingan Dalam Program Kota Layak Anak Di Kabupaten Boyolali. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(4), 430-449.
- Resviya, R. (2023). Perspektif Generasi Millenial Terhadap Eksistensi Bahasa Indonesia Di Media Sosial. *Jurnal Ilmiah Kanderang Tingang*, 14(1), 17–27. <https://doi.org/10.37304/jikt.v14i1.203>
- Rhenald Kasali. *Manajemen Public Relations : Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia / Rhenald Kasali* .2008.
- Sahara, H., Subowo, A., & Herawati, A. R. (2023). Peran Stakeholders Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Dadapsari Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 12(4), 1-13.
- Sandy, O. F. (2020). Analisis Peran Aktor dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 6(3), 415-422.
- Samode, R., Tulusan, F., & Londa, V. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mempromosikan Pariwisata Tanjung Bongo Di Desa Soasio Kecamatan Galela Induk Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(84).
- Sari, Y. R. (2021). Peran Pemangku kepentingan Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2).
- Setiawan, B., & Nurcahyanto, H. (2020). Analisis Peran Pemangku kepentingan dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2), 127-144.
- Shafira, A. Y., & Utami, E. R. (2021). Aksesibilitas informasi, sistem pengendalian internal, pelatihan, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa: peran teknologi informasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 1025-1040.
- Sholihah, A. R., Widowati, N., & Maesaroh, M. (2023). Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Desa Wisata Sembungan Kabupaten Wonosobo. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 12(3), 551-566.
- Sofiyah. (2022). Implications of Power and Pemangku kepentingan Interest in the Implementation of Child Friendly City (CFC) Policies in Yogyakarta City. *International Journal of Science and Society*, 4(3), 1-12.
- Subhan, S. (2019). Governance: Perubahan Paradigma Pada Penyelenggaraan Pemerintahan. *SOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, 13(01), 33–47. <https://doi.org/10.32534/jsfk.v13i01.1456>

- Wahyuni, N., Jamilah, M., & Fajri, H. (2022). Power Sharing Pemangku kepentingan of Child-Friendly City Task Force. *Jurnal Public Policy*, 8(1), 11-16.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.
- Yuniningsih, T., & Dwimawanti, I. H. (2021). Peran Pemangku kepentingan Dalam Upaya Reintegrasi Sosial Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 249-260.

Tesis/Disertasi

- Alifisyiam, F. N. (2024). *Peran Stakeholders Dalam Penurunan Angka Prevalensi Stunting Di Kota Semarang*. (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro).
- Apriliana, Winda Ariestha (2017) *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas*. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
- Gayatri, N. A. P. (2023). *Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Desa Wisata Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang* (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro).
- Mubarak, M. M. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Di Desa Kaligono Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo* (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro).
- Rachman, Nadya Nursuciani (2017) *Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kabupaten layak anak (studi kasus pemenuhan hak perlindungan khusus bagi anak berhadapan hukum di Kabupaten Banyumas)*. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
- Ramadani, N. (2022). *Analisis Pemangku kepentingan Dalam Pengembangan Pariwisata Kampung Tematik “Kampung Edukasi Omah Ampiran”* (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro).
- Susanti, Silvia Dewi. (2023). *Peningkatan Perlindungan Anak Melalui Pembentukan Kabupaten Layak Anak (Studi Di Kabupaten Banyumas)*. (S1 Thesis, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto).
- Wijayanti, D. M. (2024). *Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Desa Wisata “Ekowisata Tambaksari” Kecamatan Wanareja Kabupaten*

Cilacap. (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro).

Buku

- AG. Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, Agus. (2018). Ilmu Administrasi Publik Di Indonesia ; Mencari Identitas? Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis).
- Keban, Yermias. (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta : Gava Media
- Muhammad. (2019). Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Lhokseumawe : Unimal Press.
- Muhammad, N., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara.
- Pasolong Harbani. 2014. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In Antasari Press.
[https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR_METODOLOGI_PENELITIAN.pdf)
- Sadhana, K. (2011). Realitas Kebijakan Publik. Malang : Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press).

Peraturan

- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 – 2026.

Keputusan Bupati Nomor 460/142/Tahun 2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Surat Keputusan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2023 Tentang Penerima Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2023

Publikasi

Badan Pusat Statistik Banyumas. (2024). Banyumas dalam Angka 2024.

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. (2022). Profil Kesehatan 2022 Kabupaten Banyumas.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas. (2023). Data dan Informasi Kabupaten Banyumas 2023.

Berita/Artikel

Dhini,V. (2022). “Jumlah Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Banyumas Tertinggi se-Jateng.” *Katadata*, ed. Annissa Mutia.

Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. (2023). “Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Raih Predikat KLA 2023.” *DP3APKB News*.

Humas Puskesmas Lumbir. (2018). “Anak Anak Pada Betah di Puskesmas Karena Ruang Tunggu Ramah Anak di Puskesmas Yang Bikin Betah.” Diakses melalui puskesmaslumbir.banyumaskab.go.id

Rohman, M. (2023). “Angka Kematian Bayi di Banyumas Tertinggi Kedua di Jawa Tengah, Ini Pesan Pj Bupati.” *Serayunews*, ed. Kholil Rokhman

Sumarwoto. (2023). "Bupati: Angka pernikahan dini di Kabupaten Banyumas tinggi." *Antaranews*, ed. Susilo Edhy

Wahyudi, A. (2024). "Kasus Kematian Ibu Hamil dan Bayi di Banyumas Tinggi, Tahun 2023 Ada 256 Bayi Meninggal." *Serayunews*, ed. Dedy Afrengky

Wahyudi,A. (2024). Polresta Banyumas Kampanyekan ‘Stop Bullying’ di Sekolah.” *lencabanyumas*, ed. Tim Lensa Banyumas